

DPRD Kolaka Utara Setujui 4 Raperda

Lasusua, SultraNET. | Pada rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini Rabu (27/9/2023), anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara membacakan dan memberikan pendapat akhir terkait beberapa aspek yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kabupaten Kolaka Utara; Pengelolaan Keuangan Daerah; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pandangan fraksi dibacakan oleh anggota DPRD Kolaka Utara Oleh H.Baharuddin dari fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa Fraksi Demokrat menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah yang digunakan dari APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Demokrat mengingatkan perluasan prioritas program untuk memenuhi aspirasi masyarakat

“Fraksi Demokrat menekankan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) PDAM Patampanua di Kabupaten Kolaka Utara untuk mengatur tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menetapkan biaya atau tarif yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola perusahaan,”Katanya.

Sementara Fraksi Persatuan Pembangunan menyoroti prioritas program yang harus mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan PAD, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Mereka juga mengingatkan untuk memperhatikan pengelolaan PDAM agar meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan air.

Fraksi Bulan Bintang mengapresiasi Ranperda Perubahan APBD 2023 sebagai pemacu pembangunan dan berharap implementasinya dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Mereka menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

terlibat dalam membahas Ranperda ini.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mendorong penggunaan alokasi anggaran dengan cermat dan memaksimalkan manfaatnya untuk mendukung perekonomian masyarakat. Mereka juga meminta perhatian terhadap anggaran kecamatan dan kelurahan.

Fraksi Karya Indonesia Raya menekankan penanganan isu sosial terkait PKH, peningkatan pelayanan PDAM, dan responsif terhadap permintaan masyarakat yang disampaikan melalui proposal.

Fraksi PDI Perjuangan ini berterima kasih kepada OPD atas kerjasamanya dalam pembahasan dan berharap target PAD dapat tercapai. Mereka juga mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan batas waktu.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2023, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tampanama Kolaka Utara, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pencegahan serta Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah melalui pembahasan dan harmonisasi. DPRD Kolaka Utara menyepakati untuk menetapkan peraturan daerah ini, dengan harapan dapat membawa manfaat dan kemajuan bagi masyarakat Kolaka Utara. Semoga implementasi peraturan ini berjalan efektif untuk kesejahteraan masyarakat. (BeritaKolutKab)

Posyandu Didorong Tekan Angka Prevalensi Stunting di Bombana

Bombana, SultraNET. | Pj. Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos bersama Tim Penilai kunjungi pulau Kabaena dalam rangka melaksanakan Program Penilaian Lomba Posyandu, Kesehatan Lingkungan (Kesling) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2023 dalam Program Pokok PKK di Pulau Kabaena, Sabtu (23/9/2023).

Kegiatan penilaian ini dilaksanakan di beberapa desa atau kelurahan di Pulau Kabaena, diantaranya Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena dan Desa

Langkema Kecamatan Kabaena Tengah, dan dihadiri langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Bombana yang akrab dengan tagline “Jangan Lupa Bahagia,” Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si.

Rombongan Pj. Bupati Bombana beserta Ketua TP PKK Kab. Bombana disambut dengan hangat oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa bersama masyarakat Pulau Kabaena, dengan mempersembahkan tarian adat Kabena yaitu Tari Lumense pada saat penjemputan.



Pj. Bupati Bombana saat memberikan sambutan

Pj Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengatakan dalam pelaksanaan lomba Posyandu, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu bagaimana dapat menangani stunting, dapat menangani Inflasi, menangani kemiskinan ekstrem, dan untuk mewujudkan itu, peran Pengurus PKK di Bombana sangat diperlukan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang stunting, inflasi maupun kemiskinan ekstrem.

“Peran Pengurus PKK di kabupaten Bombana juga diperlukan, walaupun Pemerintah Kabupaten telah mendapat salah satu nominasi kabupaten yang berhasil menurunkan inflasi, namun kita harus terus menambah prestasi-prestasi yang membanggakan bagi Bombana. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, sehingga Bombana mampu menangani inflasi di Kabupaten Bombana,” ungkap H. Burhanuddin.

Pj. Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, .S.Sos menambahkan, bahwa ia bangga dan berterima kasih kepada seluruh kader posyandu se-Kecamatan

Kabaena tingkat Desa dan Kelurahan.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memupuk rasa semangat kader posyandu untuk tetap rutin melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya dalam menekan angka prevalensi stunting di Bombana.

“Mari terus melakukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung Program Pemerintah untuk menurunkan angka Stunting agar anak anak kita menjadi anak-anak yang sehat dan bebas dari stunting.” singkatnya. (Kominfo)